****Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan**

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 3, E-ISSN 3026-3018*

*© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved*  *ISSN*

**Jeane Langkai1, Jetty E. H. Mokat2, Anggreine Lua3**

Jeanelangkai@unima.ac.id; Jettymokat@yahoo.co.id , Luaanggreine@gmail.com

**123 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I N F O A R T I K E L |  | A B S T R A C T |
| ***Key word:****Implementation* *Program* *Non-Cash Food Aid* |  | ***The aim of this research is to find out, (1) Implementation of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in North Lowu Kelurahan Ratahan. 2) This research is descriptive research with a qualitative approach. Which consists of three informants. Techniques of data collection through observations, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification. 3) The results of this study show that in the implementation of the non-cash food relief program in the northern lowu district the district has not fully run well due to the discovery of inconsistencies.of the results of the research there are obstacles such as: frequent delays in the process of melting BPNT, melt time is not in accordance with the provisions that the process should melt in the month of March but its enforcement is often delayed, less effective communication causes less information / not delivered to the community beneficiary group(KPM). 4) The competence of staff resources is insufficient so that it needs to be improved and the implementation of non-cash food assistance programmes is not in accordance with existing procedures or mechanisms.*** |
|  |
|  |
|  |  | INTISARI  |
| **Kata kunci:**ImplementasiProgramBantuan Pangan Non Tunai |  | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui,1)Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan. 2) Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang terdiri dari 3 informan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/menarik kesimpulan. 3) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Mengimplementasikan program bantuan pangan non tunai dikelurahan lowu utara kecamatan ratahan belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena ditemukan ketidaksesuaian.dari hasil penelitian terdapat kendala seperti: sering terjadi keterlambatan proses pencairan BPNT,waktu pencairan tidak sesuai ketentuan yang seharusnya proses pencairan dibulan maret tetapi pelaksaanya sering tertunda, komunikasi yang kurang efektif menyebabkan informasi kurang/tidak tersampaikan kepada masyarakat kelompok penerima manfaat(KPM). 4) Kompetensi sumber daya pegawai kurang memadai sehingga perlu ditingkatkan dan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai kurang sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada. |
|  |  |

**I. PENDAHULUAN**

Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara secara terencana ,terarah dan berkelanjutan. PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan program sembako dimana didalamnya terdapat program Bantuan Pangan Non Tunai.

Mengingat kemiskinan yang semakin meningkat setiap tahunnya, pemerintah telah mencanangkan program yang disebut BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk membantu masyarakat meringankan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.[1]

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program termasuk program Bantuan Pangan Non Tunai.

Di kelurahan Lowu Utara Tahun 2023 ada 1672 penduduk yang terdiri dari 411 KK dan penerima BPNT ini ada sekitar 92 orang yang menerima. Peraturan Bantuan pangan non tunai ini dilakukan untuk mensejaterahkan rakyat. Banyak yang merasakan manfaat dari program BPNT. Sampai sekarang program tersebut masih berlangsung, akan tetapi berdasarkan temuan, di Kelurahan Lowu Utara program tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan efektif. Penyebabnya adalah kurangnya informasi dan komunikasi, sosialisasi, berbelit-belit, dan proses pencairan yang tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Sesuai ketentuan waktu pencairan BPNT dilakukan 3 kali dalam setahun. Tahap pertama bulan Maret, tahap kedua bulan juni dan tahap ketiga bulan September, tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu yang seharusnya menerima di bulan maret tetapi pelaksanaan bulan april, mekanisme atau SOP (Standart Operation prosedur) yang seharusnya di ikuti oleh setiap penerima KPM diabaikan, karena ketika masyarakat datang ketempat pencairan tidak dilengkapi dengan dokumen yang ditetapkan.

Penyaluran BPNT melalui rekening elektronik, untuk pembelian bahan pangan melalui e-Warung kerjasama dengan bank penyalur yang telah ditetapkan sebagai tempat pencairan/pembelian bahan pangan oleh KPM) . Hal ini dilakukan pemerintah sebagai langkah efektif agar pelaksanaan BPNT berjalan dengan baik [2]. E-Warong merupakan program pemerintah untuk pencairan dana bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dengan sistem nontunai, yang memanfaatkan teknologi jaringan internet sekaligus sebagai sarana memperlancar BPNT.[3] Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mengakses sebagian pangannya. [4]

**II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dilaksanakan di Kantor Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan dengan fokus penelitian pada Program Bantuan Pangan Non Tunai. Sumber data dalam wujud yaitu 1) data primer yaitu Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. dan 2) data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis data, menggunakan analisis data model interaktif untuk menguji data yaitu: a) Reduksi Data, b) Penyajian Data, c) Menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi.[5]. Teknik Keabsahan Data, Pengujian keabsehan data, peneliti menggunakan empat kriteria utama yaitu: a). Derajat Kepercayaan, b). Derajat keterahlian, c). Derajat Kepastian.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu jenis bantuan pangan sosial yang diberikan pemerintah kepada KPM setahun 3 kali. Bentuknya non tunai dan diterbitkan melalui mekanisme rekening elektronik dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan di pedagang makanan atau e-warong yang bermitra dengan perbankan. sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial yang mencakup program BPNT.

Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar, diberikan bantuan sosial nontunai, yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Sesuai dengan hasil temuan di lapangan terkait dengan Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Lowu Utara, maka dapat dijel askan sebagai berikut:

1. **Komunikasi**

Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. [6] Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat di mana penyusunnya melalui berbagai tahapan. [7]

Mengenai Komunikasi terkait dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Lowu Utara, berdasarkan hasil penelitian bahwa belum ada kesesuaian antara aturan dan kenyataan yang terjadi dilapangan, komunikasi dan informasi yang kurang/tidak tersampaikan kepada masyarakat yang menyebabkan banyak masyarakat dalam hal ini penerima KPM BPNT tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dengan alasan tidak mengetahui adanya pertemuan. Akibatnya banyak anggota kurang memahami dengan jelas program BPNT dan permasalahannya, sehingga memunculkan berbagai pandangan dan pertanyaan tentang keterlambatan proses pencairan.

Pada dasarnya komunikasi merupakan aspek penting dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Ulbert Silalahi (2011: 273) bahwa komunikasi merupakan sarana penyaluran masukan sosial ke dalam sistem sosial. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya komunikasi dalam setiap aktivitas manusia, karena dengan komunikasi yang efektif, setiap informasi dapat tersampaikan kepada penerima pesan, dan penerima pesan merespon isi pesan yang diterima. Melalui komunikasi kelompok penerima manfaat (KPM) mendapatkan informasi yang jelas tentang program BPNT.

1. **Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang berkualitas selalu dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. [8] Sumber Daya Manusia (SDM) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan poin penting dalam pelaksanaan kebijakan program ini.[9] Pegawai dalam instansi berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan tugas pokok organisasi.[10] Mengenai Sumber daya Program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan Lowu utara, berdasarkan hasil penelitian bahwa ada pegawai yang kurang dapat memberikan penjelasan tentang program ini ketika ada pertanyaan dari masyarakat/kelompok penerima manfaat, terutama soal keterlambatan pencairan sehingga membuat masyarakat bingung. Padahal sumber daya pegawai adalah aktor utama dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Dalam keadaan demikian, maka sumber daya manusia (pegawai) perlu didukung dengan kompetensi yang sesuai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan menurut Hayat (2017: 81) bahwa kompetensi perlu juga didukung oleh keterampilan yang cukup sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

 Pemerintah Kelurahan Lowu Utara harus mengetahui dengan jelas setiap program yang ada, salah satunya Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) agar supaya dapat menyampaikan informasi yang jelas tentang program dan permasalahannya kepada masyarakat penerima (KPM) agar supaya dalam mengimpelemntasikan program dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

1. **Struktur Birokrasi**

Pembagian wewenang dan sumber dasar untuk melaksanakan kebijakan yang utuh dibutuhkan koordinasi.[11] Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. [12]

Mengenai stuktur birokrasi dalam Program bantuan pangan non tunai dikelurahan Lowu Utara kecamatan Ratahan berdasarkan hasil penelitian ada beberapa masyarakat yang dalam proses pendaftaran KPM/pelaksanaan KPM tidak membawa dokumen-dokumen yang lengkap sesuai dengan prosedur yang diminta. Terjadinya salah penulisan nama sehingga mengakibatkan tidak efisien dalam pendataan

 Untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di kelurahan lowu utara harus sesuia dengan prosedur atau mekanisme yang ada, dan pemerintah kelurahan perlu membuat papan informasi agar supaya masyarakat bisa mengetahui dengan jelas program BPNT dan prosedurnnya sesuai dengan SOP yang ada.

Sesuai peraturan Mentri Sosial nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program bansos dimana didalamnya terdapat program BPNT yaitu Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Dalam menjalankan program BPNT terdapat standart operasional prosedur (SOP). SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif .

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Lowu Utara Kecamatan Ratahan masih Kurang efektif karena:

Komunikasi antara pemerintah/petugas kelurahan dengan kelompok penerima manfaat (KPM) kurang efektif sehingga informasi kurang tersampaikan yang menyebabkan respon terhadap pesan sangat minim. .

Sumber Daya pegawai kurang memenuhi kualifikasi, kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Kompetensi dari sumber daya pegawai belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program, karena pemahaman terhadap program kurang memadai.

 Dari aspek struktur birokrasi tampak pada prosedur kerja pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai yang kurang sesuai mekanisme yang ada.

**REFERENSI**

[1] J. Hutagalung, D. Nofriansyah, and M. A. Syahdian, “Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS,” *Jurnal Media Informatika Budidarma*, vol. 6, no. 1, p. 198, 2022, doi: 10.30865/mib.v6i1.3478.

[2] A. Wiyaka and E. Murti, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perlindungan Sosial di Kecamatan Gerih dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018,” *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, vol. 3, no. 1, pp. 1773–1778, 2019.

[3] R. Pramesti, A. S. Muhammad, and D. P. Safitri, “Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang,” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 14, no. 1, p. 81, 2019, doi: 10.20961/sp.v14i1.34583.

[4] I. Hermawan, Izzaty, E. Budiyanti, R. Sari, Y. Sudarwati, and M. Teja, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 2, pp. 131–145, 2021, doi: 10.22212/jekp.v12i2.2237.

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

[6] R. Djaenal, J. E. Kaawoan, and I. Rachman, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore,” *Jurnal Governance*, vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2021.

[7] A. Takalentangen, Abdul. R. Dilapanga, and M. Mandagi, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera ( Rastra ) Di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado,” pp. 1–14.

[8] N. R. F. Fanny and S. Megawati, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban,” *Publika*, pp. 407–418, 2022, doi: 10.26740/publika.v10n2.p407-418.

[9] W. Wiwit, M. Kamil, and T. Sulistyaningsih, “Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu,” *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, no. 11, pp. 1–12, 2020, doi: 10.31947/jgov.v13i1.9379.

[10] A. C. Alou, J. E. Langkai, and G. Tumbel, “KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN RANOWULUKOTA BITUNG,” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 1, pp. 1–23, 2022.

[11] K. Nabila, P. Suharso, and W. Hartanto, “IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, vol. 15, no. 63, pp. 303–309, 2021, doi: 10.19184/jpe.v15i2.21327.

[12] M. L. Tumetel, J. J. Mokat, and T. Goinpeace, “Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Tincep, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Socia Logica*, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2022.

(13) M. Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2010.

(14) L. K. Margareth Rantung, “DIMENSI TANGIBLE DALAM PELAYANAN DI PUSKESMAS PAPAKELAN KECAMATAN TONDANO TIMUR,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, vol. Vol. 8 No. 01, Jun. 2023.

(15) Rivai Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2004.